



► PROGRAM PEMKOT

Proyek RTLH Nyaris Rampung

UMBULHARJO—Pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Jogja sudah hampir selesai. Dari total tiga termin revitalisasi, saat ini Pemkot tinggal menyelesaikan termin II.

Kasi Pengawasan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Jogja Yunita Rahmi Hapsari mengatakan pencairan anggaran untuk rehabilitasi RTLH dilakukan dalam tiga termin, khususnya yang didanai dengan dana APBD. "Sekarang sedang diselesaikan pekerjaan fisik untuk termin kedua," kata dia, Senin (24/9).

Dia menjelaskan anggaran rehabilitasi RTLH dicairkan sebesar 40% untuk termin I, sedangkan termin II dicairkan sebesar 30%. Jika pengerjaan termin kedua selesai maka dana termin ketiga bisa dicairkan.

Dinas, lanjutnya, bekerja sama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) untuk pelaksanaan program rehabilitasi RTLH di masing-masing kecamatan. "Kalau dalam satu kelurahan ada 20 RTLH yang memperoleh bantuan rehabilitasi, maka bantuan pada termin I diberikan untuk delapan

SUMBER BANTUAN RTLH DI JOGJA

Sumber Bantuan	Jumlah Unit
APBD Jogja	92 unit
Swakelola TMMD	10 unit
DAK Pusat	207 unit
APBD DIY	203 unit

Sumber: Pemkot Jogja

rumah," katanya.

Lantaran pencairan dilakukan dalam tiga termin, lanjut Yunita, maka terkesan pekerjaan rehabilitasi RTLH rumah tidak layak huni berjalan sangat lama. "Aturannya memang seperti itu dan harus ditaati," katanya.

Jumlah RTLH di Jogja yang memperoleh bantuan dari APBD Jogja tahun ini berjumlah 92 unit, sedangkan dari dana alokasi khusus (DAK) digunakan untuk perbaikan 207 unit rumah dan Pemerintah DIY memberikan

bantuan perbaikan untuk 203 rumah. "Pekerjaan perbaikan rumah bisa dilakukan langsung oleh warga atau LPMK bisa membantu mencari tukang bangunan untuk memperbaiki rumah," katanya.

Selain itu, masih ada alokasi dana pekerjaan swakelola TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang menyasar 10 rumah di Kelurahan Pandeyan, lima rumah di Terban dan lima rumah di Kelurahan Pakuncen.

Alokasi anggaran dari dana APBD Jogja diberikan sebesar Rp12 juta per rumah, tetapi masih dipotong pajak sedangkan dari dana alokasi khusus diberikan Rp10 juta hingga Rp15 juta tergantung tingkat kerusakan rumah.

Sebagian besar RTLH yang diperbaiki biasanya mengalami kerusakan pada bagian atap, atau struktur bangunan.

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Purwadi mengatakan keterlibatan pihak swasta dibutuhkan untuk mempercepat proses pembangunan fisik dan sosial. "Pemkot sendiri sudah meluncurkan program Gandeng Gendong yang melibatkan lima unsur, yakni Pemkot Jogja, perusahaan, kampus, komunitas dan kampung. (Abdul Hamid Razak)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005